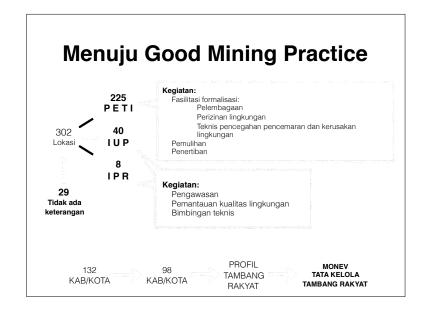
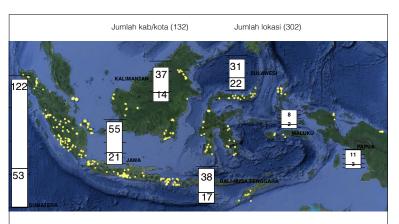


Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Basis Data Lahan Akses Terbuka

Sulistyowati Direktur Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka





Lahan Akses Terbuka

Penambangan oleh Masyarakat

Jenis Tambang

Tambang Emas:

Pencemaran merkuri dan sianida. Pengolahan bahan tambang dilakukan di rumah atau sekitar rumah (48 lokasi)

Korban jiwa (tertimbun longsor) Tambang Sirtu, Pasir, Batu, Tanah Urug, Timah:

Kerusakan bentang alam (lubang, tebing)

Korban jiwa (longsor, tenggelam) Tambang Batu Gamping:

Kerusakan sungai bawah tanah dan mata air.

3% 22% 7% 7% 13% 8% 8% 8% 9% Sirtu (45 lokasi)

Pasir Kuarsa (29 lokasi) Batu (28 lokasi) Tanah (28 lokasi) Timah (26 lokasi) Pasir (25 lokasi) Pasir Urug (25 lokasi) Batu Gamping (19 lokasi) Granit (11 lokasi) Batu Kuarsa (10 lokasi) Lainnya (19 lokasi)

Metode Penambangan

Tambang Terbuka:

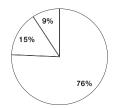
Potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan tinggi. Potensi konflik sosial Relatif lebih mudah dilakukan pemantauan dengan citra satelit Memberikan kontribusi dalam peningkatan Indeks Tutupan Vegetasi (perbaikan metode)

Tambang Dalam/Bawah Tanah

Resiko korban jiwa tinggi.

Tambang Bawah Air:

Potensi pencemaran dan kerusakan sungai Memberikan kontribusi dalam peningkatan Indeks Kualitas Air



Tambang Terbuka (Surface mining) Tambang Dalam/Bawah Tanah (Underground) Tamang Bawah Air (Underwater mining)

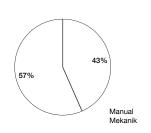
Status dan Legalitas Status Tambang Mulai Penambangan Aktif Tidak Aktif Sebelum 2010 2010-2015/ 16% 41% 59% 9% Hutan Konservasi 52% Hutan Lindung Hutan Produksi 31% Tanah Negara Kriteria lain untuk legalitas pertambangan rakyat: Aktif dan telah beroperasi minimal 15 tahun (diutamakan). Kegiatan pemulihan dilakukan pada status tambang yang tidak aktif Kendala: pada umumnya status lahannya merupakan hak milik (masyarakat)

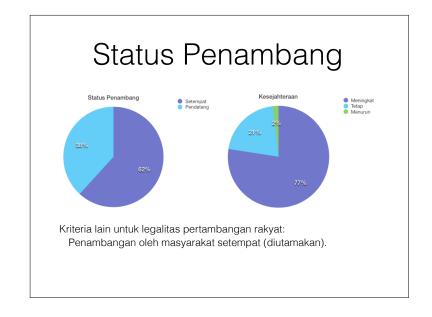
Penggunaan Peralatan

Persyaratan (legalitas) pertambangan rakyat: menggunakan peralatan tradisional/manual.

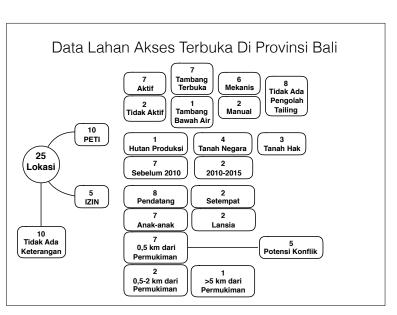
Penggunaan peralatan mekanik yang tidak terkendali, potensi kerusakan dan pencemaran (luasan dan kecepatan) lebih tinggi.

Pada umumnya ada pemodal dan "backing" di belakang penambang rakyat Potensi konflik dengan penambang atau warga.











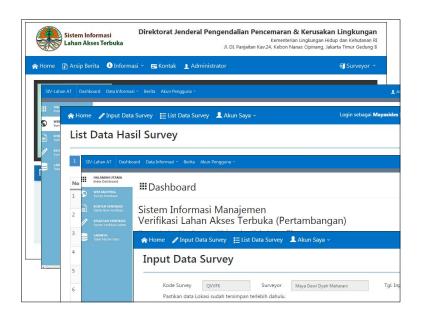
Sistem Informasi Lahan Akses Terbuka (SILAT)

Tujuan:

Sarana untuk mendukung kegiatan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan akibat pertambangan.

Sasaran

Mendukung penyediaan informasi "satu peta". Pemerintah daerah dan stakeholder lainnya dapat berperan dalam memberikan informasi berkaitan dengan sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat pertambangan.





Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia



TERIMA KASIH